



**KLIPING DIGITAL
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**

30 – 31 Maret 2022



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

31 / 03 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

NO	ANALISIS		TONE
1	TANGGAL	Rabu, 30 Maret 2022	+
	MEDIA	https://www.jitunews.com/read/147682/kementerian-pupr-dan-kementerian-keuangan-hibahkan-infrastruktur-senilai-rp222-58-t	
	JUDUL	Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan Hibahkan Infrastruktur Senilai Rp222,58 T	
	NARASUMBER	Menteri Keuangan, Sri Mulyani Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah	
	RESUME	Kementerian PUPR bersama Kemenkeu melakukan Serah Terima Hibah BMN Kementerian PUPR kepada Pemerintah Daerah, Yayasan, dan Perguruan Tinggi, serta Alih Status Penggunaan BMN kepada Kementerian/Lembaga pada Selasa (29/03) di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta. Kegiatan ini merupakan upaya percepatan penyerahan infrastruktur yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR yang didanai oleh APBN, untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk pelayanan bagi masyarakat, di mana hal tersebut merupakan bagian dari amanah tata kelola APBN dan Pengelolaan BMN, sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sri Mulyani menjelaskan, Kementerian PUPR sebagai salah satu kementerian yang mengelola aset dan anggaran infrastruktur yang besar, telah memberikan hibah BMN dengan nilai yang besar dalam 3 tahun terakhir (2019-2021) senilai Rp266,3 triliun.	
2	TANGGAL	Rabu, 30 Maret 2022	+
	MEDIA	https://lingkarmadiun.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-664112420/tapera-targetkan-biayai-200-ribu-rumah-pekerja-di-tahun-2022-dan-telah-berkiprah-sejak-2018	
	JUDUL	Tapera Targetkan Biayai 200 Ribu Rumah Pekerja di Tahun 2022, dan Telah Berkiprah Sejak 2018	
	NARASUMBER	Komisioner BP Tapera Adi Setianto	



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

31 / 03 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

	RESUME	BP Tapera memberikan target membiayai pembangunan hunian 200 ribu unit dan renovasi 26.000 rumah lainnya agar menjadi hunian sehat. Target adalah bagian dari Program Satu Juta Rumah per tahun yang dilaksanakan Kementerian PUPR sejak 2016. BP Tapera yang sudah berkiprah sejak 2018 akan menyalurkan dana Rp23 triliun. Rinciannya, Rp19,1 triliun berasal dari APBN . Sebagai fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), yang disalurkan sebagai PMN. Bunganya 5% per tahun. Ada pula dana Rp3,9 triliun dari tabungan serta pengembalian pokok kredit.	
3	TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER RESUME	Rabu, 30 Maret 2022 https://ekonomi.bisnis.com/read/20220330/47/1517096/ini-cara-pemerintah-agar-mbr-non-formal-bisa-punya-rumah Ini Cara Pemerintah Agar MBR Non Formal Bisa Punya Rumah Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menuturkan pemerintah telah memberikan bantuan pembiayaan perumahan berupa FLPP, BP2BT, dan SSB/SSM dari 2010 hingga 2021 mencapai 1.767.622 unit dengan nilai Rp88,68 triliun. Dari total pembiayaan Rp88,68 triliun itu, hanya 12,39 persen penerima memiliki penghasilan tak tetap. Saat ini, backlog kepemilikan rumah mencapai 12,71 juta unit. Backlog kepemilikan rumah setiap tahunnya mengalami kenaikan 680.000 per tahun. Penyelesaian backlog pada tahun 2045 membutuhkan kinerja perumahan kurang lebih sebesar 1,5 juta unit per tahun.	+



30 / 03 / 2022

| Sumber: jitunews.com

Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan Hibahkan Infrastruktur Senilai Rp222,58 T

Penulis: Iskandar

JAKARTA, [JITUNews.COM](https://www.jitunews.com) – Barang Milik Negara (BMN) yang tercatat pada Kementerian/Lembaga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kementerian Keuangan (Kemenkeu), selaku pengelola BMN, dan Kementerian PUPR, sebagai pengguna BMN, bersinergi untuk mengoptimalkan manfaat aset negara pada APBN, melalui mekanisme hibah BMN untuk mendukung percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian PUPR bersama Kemenkeu melakukan Serah Terima Hibah BMN Kementerian PUPR kepada Pemerintah Daerah, Yayasan, dan Perguruan Tinggi, serta Alih Status Penggunaan BMN kepada Kementerian/Lembaga pada Selasa (29/03) di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta.

Kegiatan ini merupakan upaya percepatan penyerahan infrastruktur yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR yang didanai oleh APBN, untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk pelayanan bagi masyarakat, di mana hal tersebut merupakan bagian dari amanah tata kelola APBN dan Pengelolaan BMN, sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

“Akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip yang harus dijaga, termasuk tata kelola. Dan seremoni seperti ini termasuk akuntabilitas, transparansi dan tata kelola

yang baik. Kita makin bisa menjelaskan kepada publik,” kata Sri Mulyani melalui siaran pers, Rabu (30/3).

“Kami di Kemenkeu tiap hari harus bisa memberikan edukasi, misalnya kenapa saya harus membayar pajak? Salah satu yang pasti ditanyakan kemudian, kalau sudah bayar pajak, jadinya apa? Jadi penting untuk kami untuk terus menerus mengajak Kementerian/Lembaga untuk mengedukasi masyarakat bahwa infrastruktur yang dihasilkan adalah hasil dari pajak yang dihimpun dari publik. Bagaimana kita mengelola sumber daya dari masyarakat,” lanjutnya.

Sri Mulyani menjelaskan, Kementerian PUPR sebagai salah satu kementerian yang mengelola aset dan anggaran infrastruktur yang besar, telah memberikan hibah BMN dengan nilai yang besar dalam 3 tahun terakhir (2019-2021) senilai Rp266,3 triliun.

BMN yang dihibahkan berupa infrastruktur jalan, jembatan, waduk, rumah susun, jaringan irigasi, dan lain sebagainya. Pada tahun 2019, Kementerian PUPR menyerahkan hibah senilai Rp18,3 triliun, pada tahun 2020 senilai Rp14,3 triliun, dan pada tahun 2021 senilai Rp233,7 triliun.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan nilai BMN Kementerian PUPR yang diserahterimakan mencapai



30 / 03 / 2022

Sumber: jutinews.com

total sebesar Rp222,58 triliun, yang terdiri dari BMN yang dihibahkan sebesar Rp221,58 triliun dan BMN yang dialihstatuskan penggunaannya sebesar Rp1 triliun.

"BMN yang diserahterimakan merupakan BMN yang telah selesai dibangun oleh Ditjen Bina Marga sebesar Rp220,65 triliun (99,13%), Ditjen Cipta Karya sebesar Rp0,85 triliun (0,38%), dan Ditjen Perumahan sebesar Rp1,08 triliun (0,49%). Serah terima BMN kategori alih fungsi penggunaan diberikan kepada 6 Kementerian/ Lembaga, sedangkan kategori hibah diberikan kepada 3 Pemerintah Provinsi, 18 Pemerintah Kabupaten, 3 Pemerintah Kota, 3 Yayasan, dan 2 Universitas," kata Fatah.

Jenis BMN yang diserahterimakan oleh Ditjen Bina Marga berupa jalan arteri nasional, tanah untuk jalan nasional, dan jembatan gantung. Penerima hibah sektor bina marga antara lain Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Karawang, Tolikara, Asahan, dan Pemerintah Kota Bekasi.

Sedangkan Ditjen Cipta Karya menyerahterimakan BMN berupa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan SPAM Regional, Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah, Pengelolaan Limbah, Penanganan Kawasan Kumuh, serta Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Pendidikan, Sarana Olahraga, dan Pasar.

Penerima hibah sektor cipta karya antara lain Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Humbang

Hasundutan, Kapuas, Merauke, dan Sintang.

Untuk sektor perumahan, telah dilakukan hibah BMN berupa rumah susun dan rumah khusus antara lain kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Universitas Padjajaran, Universitas Gadjah Mada, dan Pondok Pesantren Putra-Putri Al-Ittihad.

Kementerian PUPR juga melakukan pengalihan status penggunaan BMN sebesar Rp1 triliun dari Kementerian PUPR kepada 6 Kementerian/Lembaga yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Pertanian.

Alih status ini dilaksanakan agar BMN digunakan secara optimal untuk penyelenggaraan pemerintah pusat, khususnya oleh Kementerian/Lembaga yang membutuhkan serta untuk efisiensi pembiayaan dari APBN.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjadja menegaskan bahwa, "Melalui hibah ini, penerima aset diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset tersebut dengan sebaik-baiknya, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah maupun untuk pelayanan publik."

"Para penerima aset wajib menjaga dan memelihara aset tersebut, karena aset yang terbentuk dibiayai dari pajak masyarakat dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk aset melalui mekanisme APBN," tuntasnya.



**KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**

30 / 03 / 2022

|

Sumber: jitunews.com

<https://www.jitunews.com/read/147682/ke-menterian-pupr-dan-kementerian->

[keuangan-hibahkan-infrastruktur-senilai-rp222-58-t](#)



30 / 03 / 2022

Sumber: lingkarmadiun.com

Tapera Targetkan Biayai 200 Ribu Rumah Pekerja di Tahun 2022, dan Telah Berkiprah Sejak 2018

Author: Desy Puspitasari

Editor: Khoirul Ma'ruf

LINGKAR MADIUN - Memasuki tahun 2022, BP [Tapera](#) memberikan target membiayai pembangunan hunian 200 ribu unit dan renovasi 26.000 rumah lainnya agar menjadi hunian sehat.

Target adalah bagian dari [Program Satu Juta Rumah](#) per tahun yang dilaksanakan Kementerian PUPR sejak 2016.

BP [Tapera](#) yang sudah berkiprah sejak 2018 akan menyalurkan dana Rp23 triliun. Rinciannya, Rp19,1 triliun berasal dari [APBN](#).

Sebagai fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), yang disalurkan sebagai PMN. Bunganya 5% per tahun.

Ada pula dana Rp3,9 triliun dari tabungan serta pengembalian pokok kredit.

Penyaluran keluar masuknya dana dilakukan melalui bank kustodian tunggal BP [Tapera](#), yakni Bank BRI.

BP [Tapera](#) adalah badan hukum publik. Ia bertanggung jawab pada Komite [Tapera](#) yang terdiri dari Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan unsur profesional yang ditunjuk pemerintah.

Komite ini melakukan pengawasan ke BP [Tapera](#), yang pelaksanaannya

dilakukan, antara lain oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.

Salah satu bentuk skema pengawasan, BP [Tapera](#) telah menandatangani kontrak kinerja pengelolaan investasi pemerintah, dalam hal ini ialah FLPP, dengan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu.

Penandatanganan kontrak ini telah dilakukan 15 Maret 2022 di Gedung Kementerian Keuangan.

Komisioner BP [Tapera](#) Adi Setianto mengatakan, BP [Tapera](#) berupaya menjaga agar pengelolaan dana FLPP itu sesuai dengan tujuan investasi pemerintah, yakni menyediakan perumahan rakyat yang sehat dan terjangkau.

Sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP), menurut Adi Setianto, BP [Tapera](#) melihat optimisme dari bank penyalur untuk mengalirkan FLPP.

Jumlah pelaksana pembangunan rumah bersubsidi itu pun memperlihatkan tren yang meningkat

<https://lingkarmadiun.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-664112420/tapera-targetkan-biayai-200-ribu-rumah-pekerja-di-tahun-2022-dan-telah-berkiprah-sejak-2018>



30 / 03 / 2022

Sumber: bisnis.com

Ini Cara Pemerintah Agar MBR Non Formal Bisa Punya Rumah

Author: Yanita Petriella
Editor: Feni Freycinetia Fitriani

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mencari cara agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) non formal bisa memiliki rumah sendiri.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menuturkan pemerintah telah memberikan bantuan pembiayaan perumahan berupa FLPP, BP2BT, dan SSB/SSM dari 2010 hingga 2021 mencapai 1.767.622 unit dengan nilai Rp88,68 triliun.

"Dari total pembiayaan Rp88,68 triliun itu, hanya 12,39 persen penerima memiliki penghasilan tak tetap," ujarnya, Rabu (30/3/2022).

Herry menuturkan MBR non formal memiliki potensi resiko yang tinggi seperti pendapatan tidak tetap, ketidakpastian jaminan pembayaran, rendahnya jaminan literasi finansial, dan ketidakadaan catatan keuangan. Selain itu, keterjangkauan relatif sulit belum sepenuhnya terintegrasi sistem ketenagakerjaan, dan domisili dan tempat kerja berbeda.

Menurutnya, pembiayaan perumahan yang cocok untuk MBR non formal yakni pembiayaan mikro melalui pembangunan rumah swadaya secara bertahap, perbaikan

rumah swadaha, pembiayaan PSU secara komunal.

Agar MBR non formal dapat memiliki rumah, lanjutnya, perlu pelibatan pemerintah daerah seperti pendanaan, pendampingan pada tahap persiapan dan pembangunan, dan pemantauan.

"Juga dibutuhkan perluasan mitra pembiayaan baik melalui ADB mitra lembaga penjaminan, BPR, BPRS, PP sebagai mitra lembaga penyalur kredit," katanya.

Saat ini, backlog kepemilikan rumah mencapai 12,71 juta unit. Backlog kepemilikan rumah setiap tahunnya mengalami kenaikan 680.000 per tahun. Penyelesaian backlog pada tahun 2045 membutuhkan kinerja perumahan kurang lebih sebesar 1,5 juta unit per tahun.

Selama ini, program perumahan masih berfokus pada rumah formal baru (milik). Berdasarkan data Susenas Agustus 2021, prosentase pekerja di sektor non formal sebesar 59,45 persen, sedangkan untuk formal sebesar 40,55% persen.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20220330/47/1517096/ini-cara-pemerintah-agar-mbr-non-formal-bisa-punya-rumah>